

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah dan Lembaga

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) (bahasa jawa: *Dhaérah Istiméwa Ngayogyakarta*) merupakan wilayah tertua kedua setelah Jawa Timur. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah provinsi yang memiliki status istimewa atau otonomi khusus. Daerah ini terbentuk dari peleburan Negara Kesultanan Ngayogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Luas Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 3.185,80 km² terdiri dari satu kotamadya, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ditugaskan langsung kepada daerah kabupaten/kota untuk membantu gubernur dalam pengelolaan dan penghimpunan keuangan daerah, kas daerah, perumusan kebijakan, dan penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan barang daerah. Berikut deskripsi masing-masing kabupaten/kota di DIY :

1. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta (bahasa Jawa: *Kutha Ngayogyakarta*) adalah Ibu kota dan pusat pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta terletak di lembah tiga sungai, yaitu Sungai Winongo, Sungai Code, dan Sungai Gajahwong. Kota Yogyakarta

berbatasan dengan Semarang dan Surakarta. Dengan koordinat koordinat $7^{\circ} 48' 5''$ S dan $110^{\circ} 21' 52''$ E dan luas wilayah 13.007.13 km^2 .

a. Sejarah BKAD Kota Yogyakarta

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mempunyai tugas menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

b. Visi dan Misi BKAD Kota Yogyakarta

1) Visi

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang representatif sesuai dengan standar, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

2) Misi

- a) Mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah melalui pajak daerah.
- b) Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang representatif sesuai standar, tertib, optimal, dan akuntabel.

c. Tujuan dan Sasaran BKAD Kota Yogyakarta

1) Tujuan

- a) Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah
- b) Mengoptimalkan pendapatan atas pajak daerah

2) Sasaran

- a) Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan aset daerah
- b) Meningkatnya pendapatan pajak daerah

d. Tugas dan Fungsi BKAD Kota Yogyakarta

1) Tugas

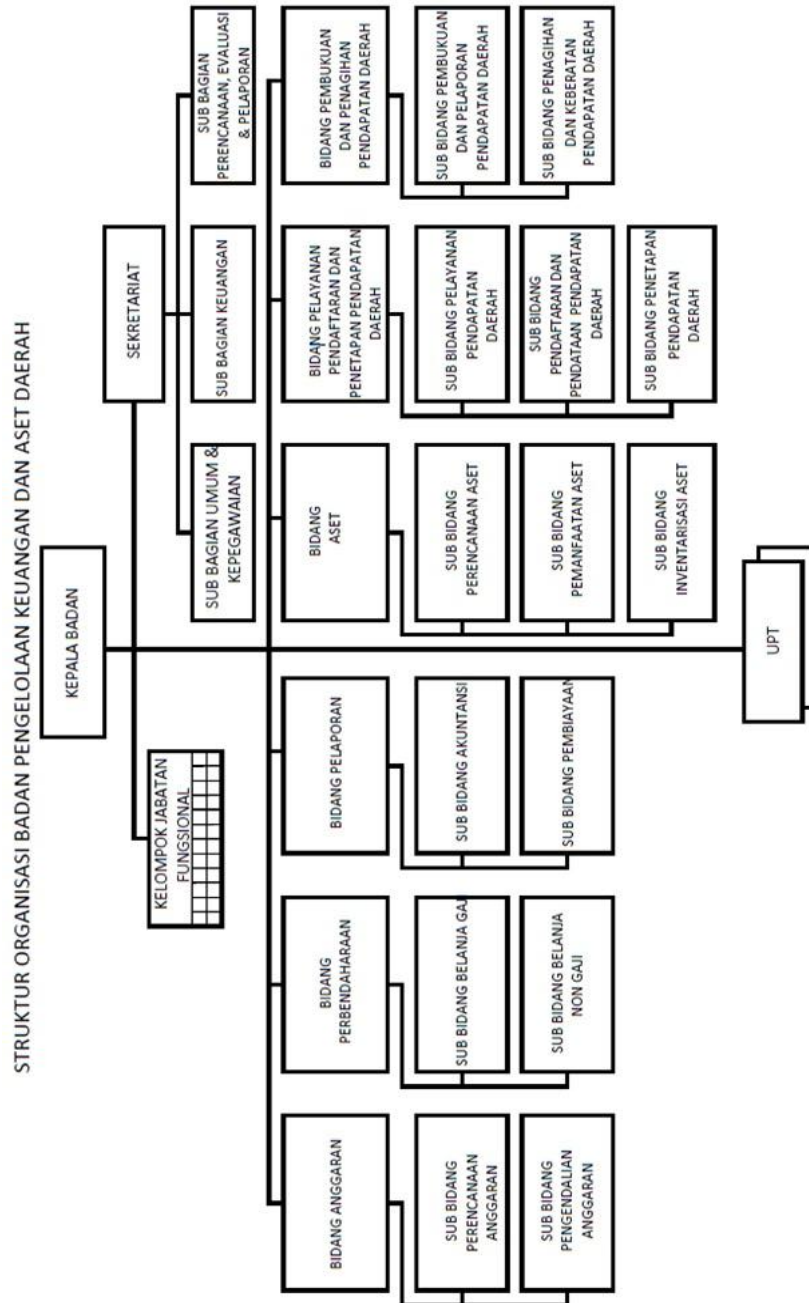
Mengelola keuangan dan aset daerah serta mengatur penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi.

2) Fungsi

- a) Merumuskan kebijakan teknis pada bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- b) Menunjang fungsi-fungsi pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

- c) Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - d) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - e) pengelolaan kesekretariatan
 - f) Melaksanakan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. Susunan Organisasi BKAD Kota Yogyakarta
- 1) Kepala Badan
 - 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 3) Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Bidang Perencanaan Anggaran
 - b) Sub Bidang Pengendalian Anggaran
 - 4) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Belanja Gaji
 - b) Sub Bidang Belanja Non Gaji
 - 5) Bidang Pelaporan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Akuntansi
 - b) Sub Bidang Pembiayaan

- 6) Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah,
terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah
 - b) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah
 - c) Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah.
- 7) Bidang Pembukuan dan Penagihan Pajak Daerah, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pajak Daerah
 - b) Sub Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak Daerah
- 8) Bidang Aset
 - a) Sub Bidang Perencanaan Aset
 - b) Sub Bidang Pemanfaatan Aset
 - c) Sub Bidang Inventarisasi Aset
- 9) Unit Pelaksana Teknis
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4.1
Struktur Organisasi BKAD Kota Yogyakarta

2. Kabupaten Sleman

Sleman adalah sebuah Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu kota kabupaten ini adalah Sleman. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di utara dan timur, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta di selatan, serta Kabupaten Kulon Progo di barat. Pusat pemerintahan di Kecamatan Sleman, yang berada di jalur utama antara Yogyakarta – Semarang. Kabupaten Sleman terletak pada koordinat $107^{\circ} 15' 03''$ dan $107^{\circ} 29' 30''$ Bujur Timur – $7^{\circ} 34' 51''$ dan $7^{\circ} 47' 30''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah $574,82 \text{ km}^2$.

a. Sejarah BKAD Kabupaten Sleman

Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang dapat melaksanakan fungsi penyelenggaraan, urusan pemerintahan, pengalokasian anggaran maka terdapat perubahan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi keuangan. Sehingga menetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.23 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Berbagai tugas dan fungsi BKAD diatur dalam peraturan tersebut, sehingga dapat terselenggara pengelolaan keuangan dan aset daerah yang memadai.

b. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Sleman

1) Visi

Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasikan sistem e-government menuju smart regency tahun 2021.

2) Misi

a) Meningkatkan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

b) Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.

d. Tugas dan Fungsi BKAD Kabupaten Sleman

1) Tugas

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2) Fungsi

a) Perumusan Kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

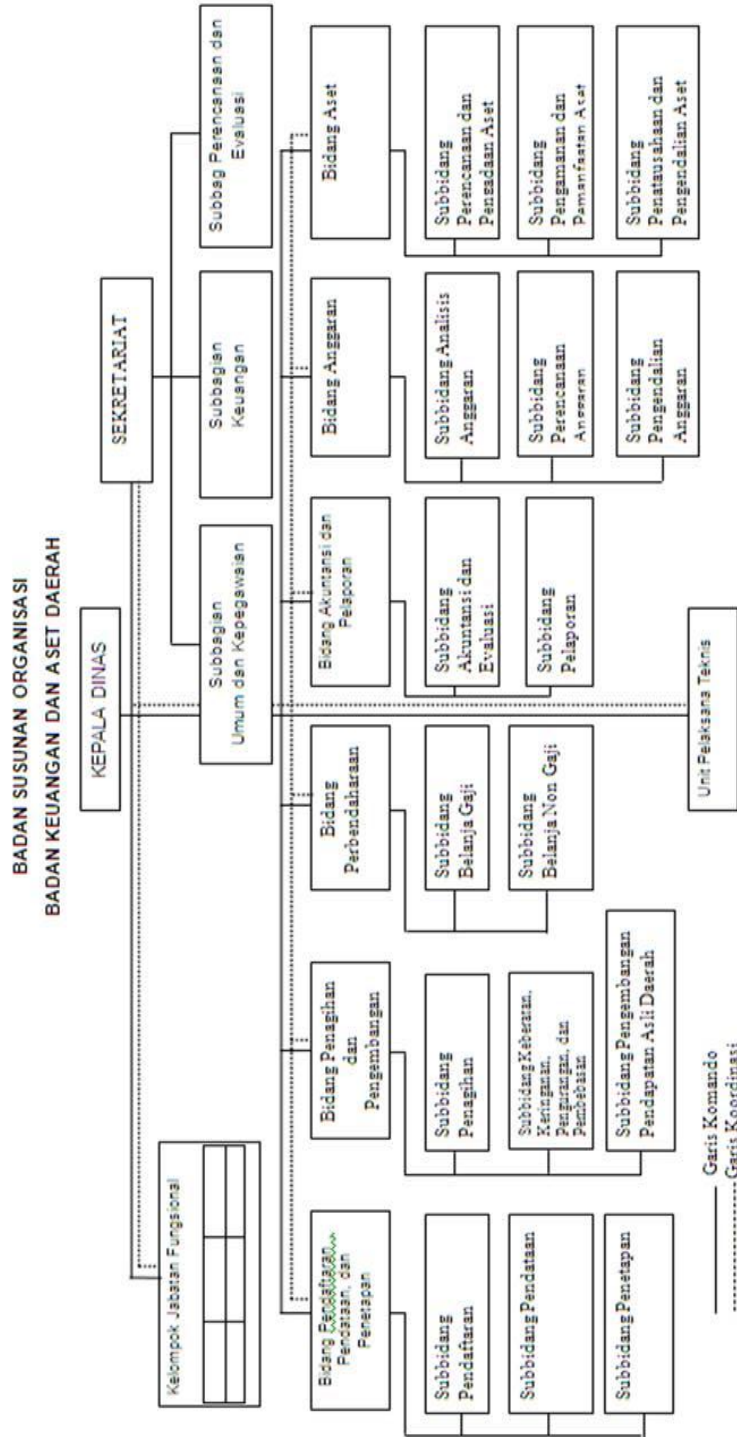
b) Pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah

- c) Penyelenggaraan pelayanan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d) Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e) Pengoordinasian pengelolaan keuangan dan aset daerah
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

e. Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Sleman

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
- 3) Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Pendaftaran
 - b) Sub Bidang Pendataan
 - c) Sub Bidang Penetapan
- 4) Bidang Penagihan dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Penagihan
 - b) Sub Bidang Keberatan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan
 - c) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
- 5) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Belanja Gaji

- b) Sub Bidang Belanja Non Gaji
- 6) Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Analisis Anggaran
 - b) Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 - c) Sub Bidang Pengendalian Anggaran
- 7) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Akuntansi dan Evaluasi
 - b) Sub Bidang Pelaporan
- 8) Bidang Aset, terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Aset
 - b) Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset
 - c) Sub Bidang Penatausahaan dan Pengendalian Aset.
- 9) Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari :
 - a) UPT Stadion Maguwoharjo
 - b) UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4.2
Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Sleman

3. Kabupaten Bantul

Bantul merupakan Ibukota Kabupaten Bantul yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten tersebut berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di sebelah utara, di sebelah timur Kabupaten Gunung Kidul, di sebelah selatan Samudra Hindia, serta di paling barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Bantul terletak antara $07^{\circ} 44' 04'' - 08^{\circ} 00' 27''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 12' 34'' - 110^{\circ} 31' 08''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Bantul $508,85 \text{ km}^2$.

a. Sejarah BKAD Kabupaten Bantul

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Dalam Peraturan Daerah tersebut Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diganti menjadi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Untuk menunjang penyelenggaraan urusan administrasi BKAD Kabupaten Bantul ditunjuk langsung untuk melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Bantul

1) Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2) Misi

- a) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur.
- c) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan.
- d) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
- e) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis, nasionalis, aman, progresif dan harmonis serta berbudaya istimewa.

3. Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Bantul

1) Tujuan

- a) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan SAP berbasis akrual.
- b) Mewujudkan optimalisasi dan ketepatan waktu penyerapan belanja pemerintah daerah.
- c) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

2) Sasaran

- a) Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah
- b) Meningkatnya penyerapan anggaran belanja pemerintah
- c) Meningkatnya kontribusi PAD daerah

4. Tugas dan Fungsi BKAD Kabupaten Bantul

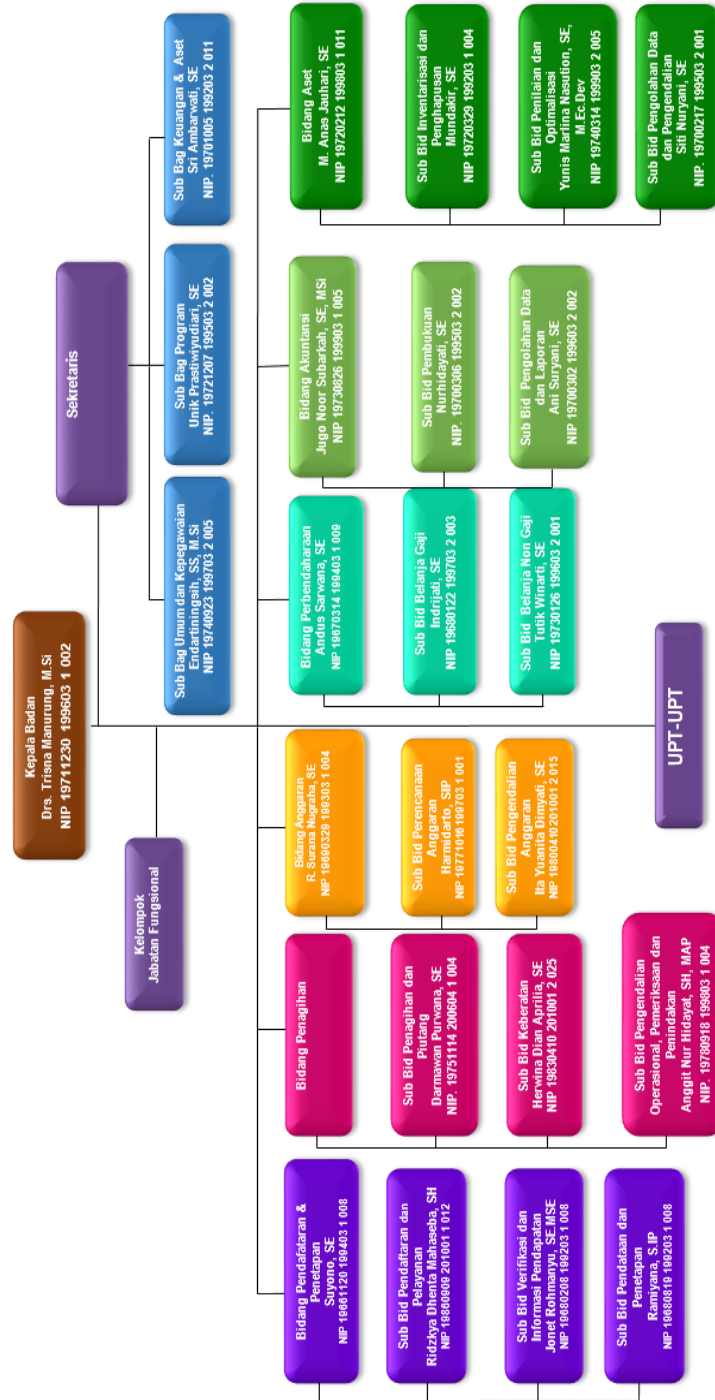
- 1) Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- 2) Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- 4) Pembinaan penyelenggaraan fungsi penunjang teknis bidang pendapatan, keuangan dan aset.
- 5) Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- 6) Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah.

- 7) Pelaksanaan fungsi Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah.
- 8) Pelaksanaan kesekretariatan Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Susunan Organisasi

- 1) Kepala Badan
- 2) Sekretariat, terdiri atas :
 - a) Sub Bagian Umum
 - b) Sub Bagian Program
 - c) Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- 3) Bidang Pelayanan dan Penetapan terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pelayanan
 - b) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pendapatan Daerah
 - c) Sub Bidang Pendataan, Penilaian dan Penetapan.
- 4) Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Penagihan
 - b) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - c) Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan

- 5) Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran
 - b) Sub Bidang Pengendalian Anggaran
- 6) Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung
 - b) Sub Bidang Belanja Langsung
- 7) Bidang Akuntansi, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Pembukuan
 - b) Sub Bidang Pengolahan Data dan Laporan
- 8) Bidang Aset, terdiri atas :
 - a) Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan
 - b) Sub Bidang Penilaian dan Optimalisasi; dan
 - c) Sub Bidang Pengolahan Data dan Pengendalian
- 9) Unit Pelaksana Teknis
- 10) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4.3
Struktur Organisasi BKAD Bantul

4. Kabupaten Gunung Kidul

Gunung Kidul adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pusat pemerintahan berada di Wonosari. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo di utara, di sebelah timur Kabupaten Wonogiri, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman di perbatasan paling barat. Koordinat Kabupaten Bantul terletak antara $110^{\circ} 50'$ Bujur Timur dan $7^{\circ}46' - 8^{\circ} 09'$ Lintang Selatan dengan luas wilayah $1.485.36 \text{ km}^2$.

a. Sejarah BKAD Kabupaten Gunung Kidul

Gunung Kidul mempunyai banyak sekali potensi yang dapat dioptimalkan untuk perekonomian daerah mulai dari pertanian, perikanan, flora dan fauna, serta potensi wisata. Dalam perkembangan peraturan kedudukan BKAD Gunung Kidul dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah. Regulasi tersebut disempurnakan lagi, sehingga menetapkan Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah sepenuhnya dilimpahkan kepada BKAD Kabupaten Gunung Kidul.

b. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Gunung Kidul

a) Visi

Gunung Kidul yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera taun 2025.

b) Misi

- a. Mewujudkan pemerintah daerah yang baik dan bersih
- b. Pemantapan sistem dan peningkatan SDM
- c. Mewujudkan kemampuan keuangan daerah
- d. Mewujudkan pendayagunaan SDA dan lingkungan hidup
- e. Menyediakan sarana dan parasana yang memadai

c. Tugas dan Fungsi BKAD Kabupaten Gunung Kidul

1) Tugas

Membantu pemerintah daerah dalam bidang keuangan, sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintahan.

2) Fungsi

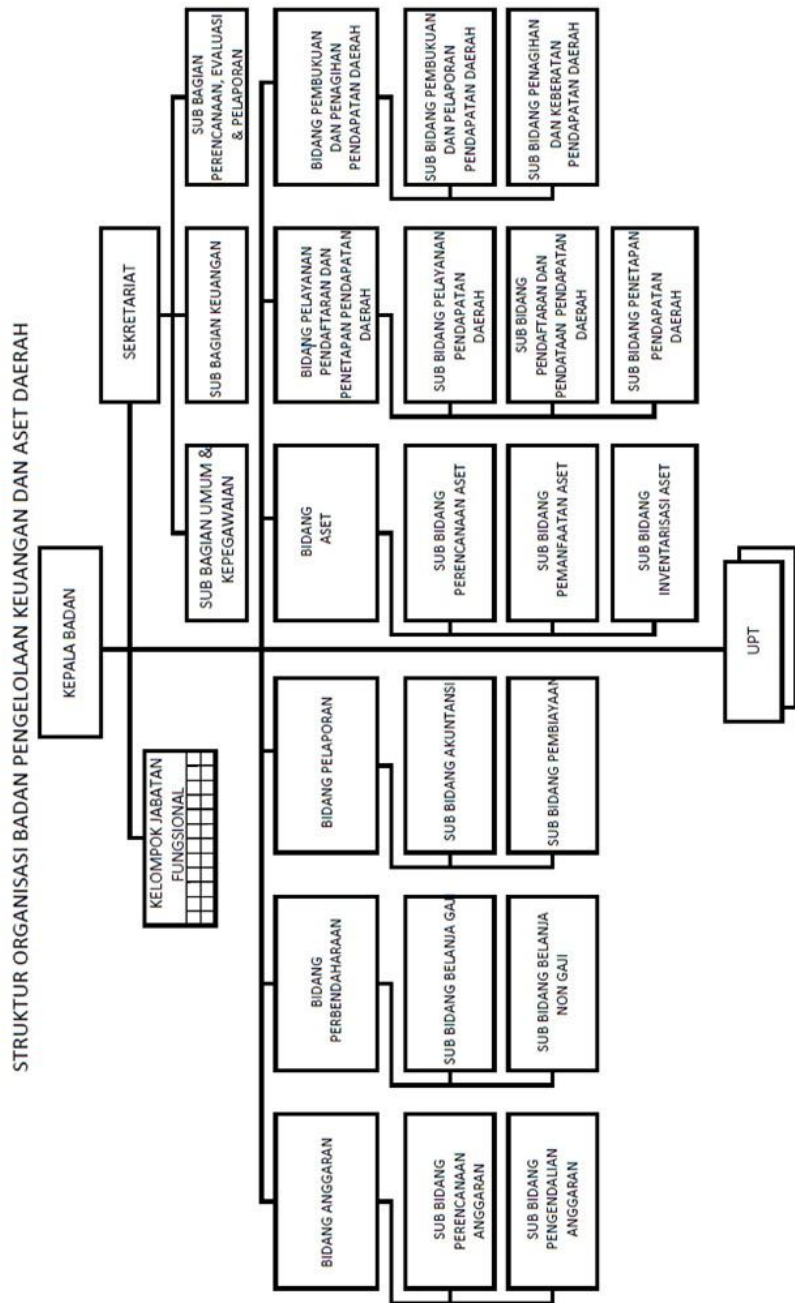
- a) Merumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah
- b) Pengelola dan pemungut pajak daerah
- c) Pembinaan pendapatan daerah
- d) Penyusun rencana pendapatan daerah dan belanja daerah
- e) Pengelola barang milik daerah

d. Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Gunung Kidul

1) Kepala Badan

- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum
- c) Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan
 - b. Sub Bidang Pengolah Data dan Penetapan
- d) Bidang Penagihan, Pelayanan, dan Pengendalian, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan
 - b. Sub Bidang Pelayanan dan Keberatan
 - c. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan
- e) Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran
 - b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran
 - c. Sub Bidang Hibah dan Bantuan Keuangan
- f) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perbendaharaan Pendapatan
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Non Gaji
 - c. Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Gaji
- g) Bidang Akuntansi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Akuntansi Pendapatan
 - b. Sub Bidang Akuntansi Belanja
 - c. Sub Bidang Akuntansi Aset dan Selain Kas

- h) Bidang Aset, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Perencanaan Aset
 - b. Sub Bidang Pendayagunaan Aset
 - c. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Aset
- i) UPT
- j) Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 4.4
Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Gunung Kidul

5. Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten yang terletak di ujung barat Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Kulon Progo dengan Ibukota Wates. Batasan wilayah sebelah timur dengan Kabuapten Sleman dan Kabupaten Bantul, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, serta Kabupaten Magelang di utara. Batas wilayah $7^{\circ} 38' 42'' - 7^{\circ} 59' 3''$ Lintang Selatan dan $110^{\circ} 1' 37'' - 110^{\circ} 16' 26''$ Bujur Timur dengan luas wilayah $586,27 \text{ km}^2$.

a. Sejarah BKAD Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Tata Kerja Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, menjelaskan bahwa BKAD Kabupaten Kulon Progo mempunyai fungsi untuk mengelola keuangan daerah. Dengan dibentuknya BKAD ini dalam menjalankan tugas pemerintahan, pemerintah daerah harus seimbang dengan peraturan yang berlaku. Hal tersebut menjadi acuan bagi seorang pemimpin daerah untuk melakukan pembagian tugas sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Sehingga dapat memberi pelayanan yang baik bagi masyarakat.

b. Visi dan Misi BKAD Kabupaten Kulon Progo

1) Visi

Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter, dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa.

2) Misi

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang tertib, aman, dan tenteram.

c. Tujuan dan Sasaran BKAD Kabupaten Kulon Progo

1) Tujuan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsive dan akuntabel.

2) Sasaran

Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

d. Tugas dan Fungsi BKAD Kabupaten Kulon Progo

1) Melaksanakan urusan di bidang pajak

2) Melaksanakan urusan di bidang pendapatan

3) Melaksanakan urusan di bidang anggaran dan kebijakan pengelolaan keuangan

4) Melaksanakan urusan di bidang perbendaharaan

5) Melaksanakan urusan di bidang aset

6) Melaksanakan urusan di bidang akuntansi dan pelaporan

7) Melaksanakan urusan ketatausahaan

e. Susunan Organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo

1) Kepala

2) Sekretariat, terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b) Sub Bagian Perencanaan

c) Sub Bagian Keuangan

3) Bidang Pajak, terdiri dari :

a) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

b) Sub Bidang Penetapan

c) Sub Bidang Penagihan dan Pengawasan

4) Bidang Pendapatan, terdiri dari :

a) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan

b) Sub Bidang Evaluasi dan Pengendalian Pendapatan

c) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan

5) Bidang Anggaran dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan,

terdiri dari :

a) Sub Bidang Perencanaan Anggaran

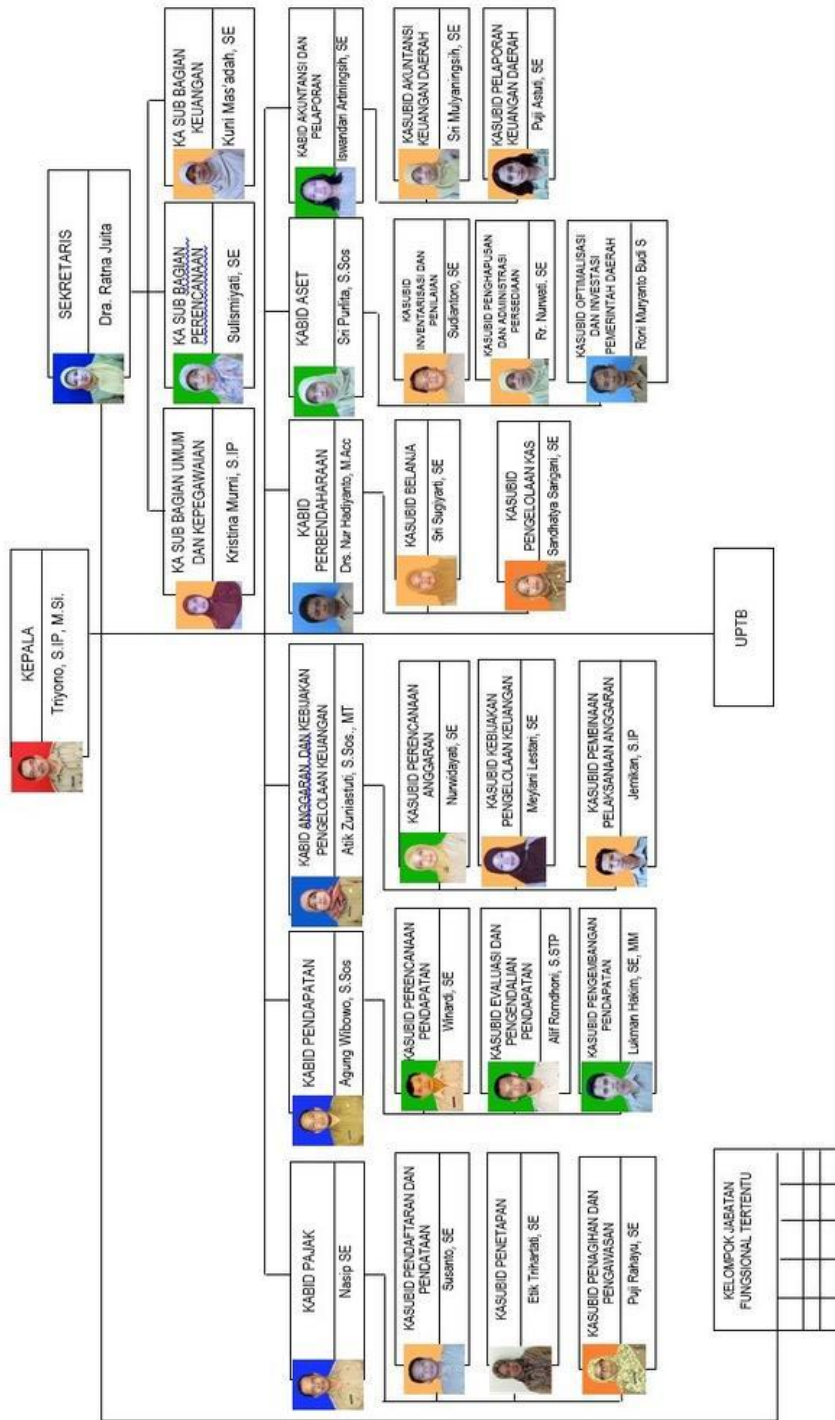
b) Sub Bidang Kebijakan Pengelolaan Keuangan

c) Sub Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran

6) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :

a) Sub Bidang Belanja

- b) Sub Bidang Pengelolaan Kas
- 7) Bidang Aset, terdiri dari :
- a) Sub Bidang Inventarisasi dan Penilaian
 - b) Sub Bidang Penghapusan dan Administrasi Persediaan
 - c) Sub Bidang Optimalisasi dan Investasi Pemerintah Daerah.
- 8) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
- a) Sub Bidang Akuntansi Keuangan Daerah
 - b) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah
- 9) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
- 10) Unit Pelaksana Teknis Badan.



Gambar 4.5
Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Kulon Progo

B. Analisis Data dan Pembahasan

Analisis potensi pendapatan asli daerah terhadap laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan untuk memprediksi tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Adapun datanya sebagai berikut:

Tabel 4.1
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2013 – 2018

Kabupaten/ Kota	Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan (Rp)	Lain-lain PAD yang Sah (Rp)
Kota Yogyakarta	2013	227,748,852,911.00	40,338,698,611.00	12,596,415,894.77	102,368,173,003.65
	2014	253,461,936,189.00	56,095,909,175.00	14,087,531,070.13	146,996,152,009.90
	2015	304,068,622,926.00	40,057,651,205.00	12,938,168,143.00	153,484,380,535.51
	2016	334,057,894,040.92	42,111,064,295.00	16,270,773,165.11	148,064,573,680.60
	2017	426,039,934,525.00	38,680,069,506.00	29,109,251,809.31	163,220,120,862.91
	2018	407,573,263,422.00	33,984,531,787.00	28,032,365,012.83	197,902,915,248.31
Sleman	2013	274,628,955,500.77	48,001,679,730.61	15,551,529,372.17	111,088,140,261.28
	2014	326,033,995,236.66	42,632,198,781.03	23,654,901,728.19	181,016,503,814.23
	2015	373,137,768,070.80	45,052,207,026.81	34,330,598,540.50	190,609,506,189.92
	2016	407,675,230,792.56	43,217,124,390.15	42,031,674,753.50	224,227,146,091.91
	2017	528,453,215,727.18	48,706,088,818.85	36,292,784,407.97	212,185,662,727.82
	2018	596,559,264,609.83	47,760,996,920.00	34,654,443,121.29	215,298,256,906.73
Bantul	2013	83,232,017,500.70	27,116,286,436.00	9,508,075,666.16	104,341,484,728.95
	2014	83,232,017,500.70	26,004,713,221.00	12,643,382,252.68	219,204,496,544.53
	2015	123,257,183,734.63	22,840,342,141.00	18,379,740,300.31	226,147,225,897.22
	2016	133,474,742,165.22	26,613,085,433.67	21,068,269,986.18	223,298,606,161.00

Kabupaten/ Kota	Tahun	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan (Rp)	Lain-lain PAD yang Sah (Rp)
Kota Yogyakarta	2013	227,748,852,911.00	40,338,698,611.00	12,596,415,894.77	102,368,173,003.65
	2014	253,461,936,189.00	56,095,909,175.00	14,087,531,070.13	146,996,152,009.90
	2015	304,068,622,926.00	40,057,651,205.00	12,938,168,143.00	153,484,380,535.51
	2016	334,057,894,040.92	42,111,064,295.00	16,270,773,165.11	148,064,573,680.60
	2017	426,039,934,525.00	38,680,069,506.00	29,109,251,809.31	163,220,120,862.91
	2018	407,573,263,422.00	33,984,531,787.00	28,032,365,012.83	197,902,915,248.31
	2017	165,562,359,004.37	31,575,738,483.00	20,130,437,131.20	276,910,533,853.40
	2018	182,127,309,683.88	46,052,620,246.00	19,652,871,723.03	214,821,154,576.84
Kulon Progo	2013	8,696,477,331.88	14,986,509,628.75	8,252,584,228.16	64,055,941,662.27
	2014	21,171,477,417.00	6,777,314,436.00	10,176,928,233.90	120,498,207,252.29
	2015	25,526,938,958.50	6,965,714,003.25	10,514,500,875.11	127,795,172,721.48
	2016	31,393,835,053.70	9,857,662,642.63	14,317,819,815.93	124,704,046,082.43
	2017	47,237,503,606.60	7,340,858,186.19	15,783,395,763.54	179,330,891,007.32
	2018	59,412,848,633.73	9,488,343,029.14	14,475,590,011.99	127,670,917,898.21
Gunung Kidul	2013	12,350,676,839.00	25,024,939,544.00	6,815,317,916.25	39,236,513,523.17
	2014	2,847,767,486,350.00	25,682,892,167.00	7,939,323,691.06	97,204,447,498.66
	2015	36,178,235,921.92	28,059,628,030.30	10,584,694,070.93	121,276,686,180.87
	2016	37,544,018,290.00	32,082,077,804.95	112,940,951,336.61	123,711,818,184.11
	2017	4,368,604,579,582.00	34,783,664,615.00	13,088,999,290.33	179,811,333,687.56
	2018	51,299,015,171.00	34,184,033,146.00	14,373,326,016.87	127,128,093,762.31

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kab/Kota DIY

Berdasarkan Tabel 4.1 terdapat total pendapatan asli daerah setiap tahun pada masing-masing Kabupaten/Kota berdasarkan komponen pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli

daerah yang sah. Pendapatan asli daerah pada setiap daerah berbeda-beda berdasarkan sistem pengelolaan pemerintah daerah tersebut. Data-data tersebut dilihat dari tahun 2013-2018. Sehingga dapat dihitung rata-rata pertumbuhan PAD dan prediksi pertumbuhan PAD. Berdasarkan rumus rata-rata pertumbuhan tersebut maka diperoleh rata-rata pertumbuhan pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Rata-rata Pertumbuhan Pajak Daerah 2013-2018

Tahun	Kota Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunung Kidul
2013 (Rp)	227,748,852,911.00	274,628,955,500.77	83,232,017,500.70	8,696,477,331.88	12,350,676,839.00
2014 (Rp)	253,461,936,189.00	326,033,995,236.66	99,558,470,705.00	21,171,477,417.00	28.477.674.863,50
2015 (Rp)	304,068,622,926.00	373,137,768,070.80	123,257,183,734.63	25,526,938,958.50	36,178,235,921.92
2016 (Rp)	334,057,894,040.92	407,675,230,792.56	133,474,742,165.22	31,393,835,053.70	37,544,018,290.00
2017 (Rp)	426,039,934,525.00	528,453,215,727.18	165,562,359,004.37	47,237,503,606.60	43.686.045.795,82
2018 (Rp)	407,573,263,422.00	596,559,264,609.83	182,127,309,683.88	59,412,848,633.73	51,299,015,171.00
Rata-rata Pertumbuhan	0.123440038	0.167834911	0.169544983	0.468613112	0.329485649
persentase	12%	17%	17%	47%	33%

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.2 rata-rata pertumbuhan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama enam tahun pengamatan 2013-2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Kabupaten Kulon Progo memperoleh rata-rata pertumbuhan pajak daerah tertinggi dibandingkan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul. Rata-rata tertinggi yaitu sebesar 47%. Walaupun Kabupaten Kulon Progo bukan termasuk Kabupaten yang memiliki pendapatan

asli daerah tertinggi jika dibandingkan dengan Kabupaten Sleman, akan tetapi rata-rata pertumbuhannya selalu naik secara signifikan setiap tahunnya. Maka, Kabupaten Kulon Progo berpotensi meningkat jika dilihat dari rata-rata pertumbuhannya.

Gunung Kidul memperoleh rata-rata tertinggi kedua setelah Kulon Progo yaitu sebesar 37%. Hal ini disebabkan Kabupaten Gunung Kidul mengalami fluktuatif sehingga mempengaruhi rata-rata pertumbuhan pajak daerah. Jika dilihat dari penerimaan pendapatan asli daerah dalam sektor pajak daerah, Kabupaten Sleman memiliki penerimaan pendapatan asli daerah tertinggi dibandingkan daerah yang lain. Akan tetapi apabila dilihat dari rata-rata pertumbuhan dapat dikatakan tidak signifikan.

Untuk memprediksi penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY untuk tahun 2019-2024, maka dihitung proyeksi penerimaan pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Proyeksi Pajak Daerah 2019-2024

Tahun	Kota Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunung Kidul
2019	457,884,122,732.93	696,682,735,854.15	213,006,081,223.88	87,254,488,516.52	68,201,304,496.79
2020	514,405,356,452.01	813,610,421,011.01	249,120,193,545.42	128,143,085,904.10	90,672,655,596.96
2021	577,903,573,435.02	950,162,653,831.42	291,357,272,409.87	188,192,616,153.11	120,547,994,406.66
2022	649,240,012,764.38	1,109,633,118,531.24	340,755,436,072.85	185,615,821,245.73	160,266,828,624.28
2023	729,382,224,907.95	1,295,868,294,524.48	398,528,810,531.46	405,898,440,030.94	213,072,448,726.43
2024	819,417,194,800.57	1,513,360,234,756.27	466,097,370,753.81	596,107,771,113.43	283,276,762,858.44

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.3 dari hasil perhitungan proyeksi pajak daerah, Kabupaten Sleman sangat berpotensi dalam pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan dalam penerimaan pajak daerah tertinggi dibanding daerah lainnya. Pada tahun 2024 diperkirakan pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman sebesar Rp 1,513,360,234,756.27. Hal ini disebabkan Kabupaten Sleman memiliki aset yang cukup banyak, berupa hotel, restoran, pusat perbelanjaan (*mall*), tempat wisata, dan memiliki wilayah yang strategis. Serta pengelolaan pemerintah Kabupaten Sleman dapat dikatakan baik dibandingkan daerah yang lain salah satunya adalah menyempurnakan mekanisme pemungutan PPB P2 dengan cara mempercepat penerbitan dan penyampaian SPPT PBB P2.

Sedangkan Kabupaten Gunung Kidul merupakan penerimaan pajak daerah terendah, yaitu sebesar Rp 283,276,762,858.44. Hal ini disebabkan Gunung Kidul tidak memiliki aset yang cukup besar, karena sektor pariwisata yang hanya dapat berkembang di Kabupaten Gunung Kidul serta bangunan-bangunan mewah lebih sedikit apabila dibandingkan Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta. Sehingga Gunung Kidul memperoleh penerimaan pajak paling rendah apabila dibandingkan daerah lainnya. Besarnya potensi penerimaan pajak daerah tergantung pada potensi daerahnya ini sendiri. Kabupaten Sleman memiliki potensi yang signifikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah dalam sektor pajak daerah.

Secara umum pada Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa relisasi pertumbuhan penerimaan retribusi daerah selama enam tahun pengamatan 2013-2018 memiliki

tingkat pertumbuhan yang berfluktuasi, dapat mengalami kenaikan atau penurunan disetiap tahunnya. Kabupaten Bantul memperoleh rata-rata pertumbuhan tertinggi dalam pencapaian realisasi retribusi daerah se Provinsi DIY, yaitu sebesar 11%. Hal ini disebabkan pemungutan Sedangkan pencapaian rata-rata tingkat pertumbuhan terendah di Provinsi DIY yaitu, Kabupaten Kulon Progo sebesar -9%. Secara umum dilihat dari rata-rata pertumbuhan realisasi retribusi daerah Kabupaten Bantul memiliki potensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel 4.4
Rata-rata Pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun 2013-2018

Tahun	Kota Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunung Kidul
2013	40,338,698,611.00	48,001,679,730.61	27,116,286,436.00	14,986,509,628.75	25,024,939,544.00
2014	56,095,909,175.00	42,632,198,781.03	26,004,713,221.00	6,777,314,436.00	25,682,892,167.00
2015	40,057,651,205.00	45,052,207,026.81	22,840,342,141.00	6,965,714,003.25	28,059,628,030.30
2016	42,111,064,295.00	43,217,124,390.15	26,613,085,433.67	9,857,662,642.63	32,082,077,804.95
2017	38,680,069,506.00	48,706,088,818.85	31,575,738,483.00	7,340,858,186.19	34,783,664,615.00
2018	33,984,531,787.00	47,760,996,920.00	46,052,620,246.00	9,488,343,029.14	34,184,033,146.00
Rata-rata Pertumbuhan	-0.033700218	-0.001004827	0.111744082	-0.087363201	0.064363696
Persentase	-3%	-0,1%	11%	-9%	6%

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 4.5
Proyeksi Retribusi Daerah Tahun 2019-2024

Tahun	Kota Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunung Kidul
2019	32,839,245,657.53	47,713,005,367.42	51,198,728,039.13	8,659,411,005.59	36,384,243,851.06
2020	31,732,555,920.29	47,665,062,038.05	56,919,882,925.71	7,902,897,137.41	38,726,068,248.27
2021	30,663,161,868.44	47,617,166,883.46	63,280,343,015.56	7,212,474,742.69	41,218,621,118.23
2022	33,848,143,191.26	72,961,321,114.87	31,948,189,319.51	12,177,288,305.54	34,184,033,146.00
2023	28,631,275,686.88	47,521,520,904.98	78,212,915,936.26	6,007,312,954.71	46,695,342,463.15
2024	27,666,395,454.94	47,473,769,984.43	86,952,746,462.14	5,482,494,862.83	49,700,827,273.12

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.5 dari hasil proyeksi dapat dilihat Kabupaten Bantul memiliki potensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah dalam sektor retribusi daerah dibanding daerah lain. Diperkirakan untuk tahun 2024 pemerintah dapat memungut retribusi daerah sebesar Rp 86,952,746,462.14 untuk Kabupaten bantul, sedangkan Kota Yogyakarta sebesar Rp 27,666,395,454.94, Kabupaten Sleman sebesar Rp 47,473,769,984.43, Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 5,482,494,862.83, dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp 49,700,827,273.12. Berdasarkan data tersebut Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi terendah dibanding Daerah lainnya. Jika dilihat dari perhitungan analisis proyeksi, Kabupaten Bantul sangat berpotensi dalam peningkatan penerimaan retribusi daerah hal ini disebabkan karena adanya sistem yang memadai dan pengelolaan pendapatan asli daerah yang tepat. Menurut Kasubbid Pengawasan, Pemeriksaan dan Keberatan bidang penagihan Kabupaten Bantul memiliki prinsip ambil bola pada seluruh wajib pajak di Kabupaten Bantul. Diharapkan daerah lain di Kabupaten/Kota Provinsi DIY dapat memperbaiki sistem dan pengelolaan untuk masa yang akan datang.

Berdasarkan Tabel 4.6 tampak bahwa hasil pengamatan tahun 2013-2018 Kabupaten/Kota di Provinsi DIY mempunyai potensi pertumbuhan PAD dalam sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Data tersebut menunjukkan rata-rata tertinggi diperoleh Kabupaten Sleman sebesar 17%. Hal ini disebabkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan bersumber dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya. Adapun

Kabupaten Kulon Progo merupakan rata-rata terendah tingkat pertumbuhannya, yaitu sebesar 12%. Kabupaten Sleman mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk dikembangkan. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo harus ditingkatkan dan perlunya perbaikan system

Tabel 4.6
Rata-rata Pertumbuhan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Tahun 2013-2018

Tahun	Kota Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunung Kidul
2013	12,596,415,894.77	15,551,529,372.17	9,508,075,666.16	8,252,584,228.16	6,815,317,916.25
2014	14,087,531,070.13	23,654,901,728.19	12,643,382,252.68	10,176,928,233.90	7,939,323,691.06
2015	12,938,168,143.00	34,330,598,540.50	18,379,740,300.31	10,514,500,875.11	10,584,694,070.93
2016	16,270,773,165.11	42,031,674,753.50	21,068,269,986.18	14,317,819,815.93	112,940,951,336.61
2017	29,109,251,809.31	36,292,784,407.97	20,130,437,131.20	15,783,395,763.54	13,088,999,290.33
2018	28,032,365,012.83	34,654,443,121.29	19,652,871,723.03	14,475,590,011.99	14,373,326,016.87
Rata-rata Pertumbuhan	0.173498529	0.173808267	0.156289756	0.118946344	0.160951913
Presentase	17%	17%	16%	12%	16%

Sumber: Data Diolah, 2019

Tabel 4.7
Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2019-2024

Tahun	Kota Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunung Kidul
2019	32,895,939,115.49	40,677,671,824.48	22,724,414,247.39	16,197,408,525.01	16,686,740,332.42
2020	38,603,336,172.12	47,747,787,470.40	26,276,007,403.12	18,124,031,055.65	19,372,503,107.12
2021	45,300,958,224.24	56,046,747,664.31	30,382,678,186.22	20,279,818,293.08	22,490,544,537.71
2022	53,160,607,852.23	65,788,135,747.53	35,131,179,543.58	22,692,028,541.43	26,110,440,700.71
2023	62,383,895,131.54	77,222,657,611.79	40,621,823,018.99	25,391,162,380.41	30,312,966,075.24
2024	73,207,409,189.15	90,644,593,905.39	46,970,597,822.90	28,411,348,322.23	35,191,895,947.33

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.7 dari hasil perhitungan proyeksi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019-2024, Kabupaten Sleman sangat berpotensi dalam pertumbuhan penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini ditunjukkan dalam penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan tertinggi dibanding daerah lainnya. Pada tahun 2024 diperkirakan penerimaan pendapatan yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di Kabupaten Sleman sebesar Rp 90,644,593,905.39. hal ini disebabkan Kabupaten Sleman memiliki aset dan investasi yang cukup banyak. Memiliki wilayah yang strategis maka banyak perusahaan daerah dan lembaga keuangan bank yang berdiri di Kabupaten Sleman sehingga memperoleh laba dari hasil perusahaan daerah tersebut. Sedangkan Kabupaten Kulon Progo merupakan penerimaan pendapatan terendah, yaitu sebesar Rp 28,411,348,322.23. Hal ini disebabkan Kabupaten Kulon Progo tidak memiliki aset yang cukup besar. Besarnya potensi penerimaan pendapatan tergantung pada potensi daerahnya ini sendiri. Kabupaten sleman memiliki potensi yang signifikan dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Tabel 4.8
Rata-rata Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Kota Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunung Kidul
2013	102,368,173,003.65	111,088,140,261.28	104,341,484,728.95	64,055,941,662.27	39,236,513,523.17
2014	146,996,152,009.90	181,016,503,814.23	219,204,496,544.53	120,498,207,252.29	97,204,447,498.66
2015	153,484,380,535.51	190,609,506,189.92	226,147,225,897.22	127,795,172,721.48	121,276,686,180.87
2016	148,064,573,680.60	224,227,146,091.91	223,298,606,161.00	124,704,046,082.43	123,711,818,184.11
2017	163,220,120,862.91	212,185,662,727.82	276,910,533,853.40	179,330,891,007.32	179,811,333,687.56
2018	197,902,915,248.31	215,298,256,906.73	214,821,154,576.84	127,670,917,898.21	127,128,093,762.31
Rata-rata Pertumbuhan	0.140925923	0.141496446	0.155377769	0.147906492	0.265057381
Persentase	14%	14%	16%	15%	27%

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.8 tampak bahwa rata-rata pertumbuhan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama enam tahun pengamatan 2013-2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Kabupaten Gunung Kidul memperoleh rata-rata pertumbuhan pajak daerah tertinggi

dibandingkan Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo. Rata-rata tertinggi yaitu sebesar 27%, Kabupaten Bantul memperoleh rata-rata tertinggi kedua setelah Kabupaten Gunung Kidul yaitu sebesar 16%.

Tabel 4.9
Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 2019-2024

Tahun	Kota Yogyakarta	Kab. Sleman	Kab. Bantul	Kab. Kulon Progo	Kab. Gunung Kidul
2019	225,792,566,250.63	245,762,194,986.86	248,199,586,281.46	146,554,275,532.79	160,824,333,399.54
2020	257,612,592,063.51	280,536,672,022.03	286,764,284,232.78	168,230,604,357.89	203,452,010,078.62
2021	293,916,884,385.02	320,231,613,952.69	331,321,078,908.99	193,113,002,945.36	257,378,467,114.17
2022	335,337,392,612.00	365,543,249,071.88	382,801,008,930.07	221,675,669,827.83	325,598,529,640.68
2023	382,595,124,193.37	417,266,319,501.37	442,279,775,619.51	254,462,940,579.52	411,900,823,300.60
2024	436,512,695,218.29	476,308,020,548.30	511,000,220,372.40	292,099,661,540.06	521,078,176,928.33

Sumber: Data Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 4.9 dari hasil proyeksi dapat dilihat Kabupaten Gunung Kidul memiliki potensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah dalam sektor lain-lain pendapatan asli daerah dibanding daerah lain. Diperkirakan untuk tahun 2024 pemerintah dapat memungut lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp 511,000,220,372.40 untuk Kabupaten Bantul, sedangkan Kota Yogyakarta sebesar Rp 436,512,695,218.29, Kabupaten Sleman sebesar Rp 476,308,020,548.30, Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 292,099,661,540.06, dan Kabupaten Gunung Kidul sebesar Rp 521,078,176,928.33. Berdasarkan data tersebut Kabupaten Kulon Progo memiliki potensi terendah dibanding Daerah lainnya. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah bersumber dari Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah merupakan komponen sangat penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Kabupaten/Kota di Provinsi DIY memiliki potensi masing-masing yang berbeda tergantung sistem pemungutan dan pengelolaan pemerintah daerah pada daerah tersebut.